

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian mengenai akuntansi biru (*blue accounting*) mempertimbangkan isu-isu menarik tentang keberlanjutan lingkungan laut, dengan fokus pada bagaimana aktivitas manusia dan bisnis dapat dikelola secara ramah lingkungan serta selaras dengan ekosistem (Aziza and Sukoharsono, 2021). Isu *blue accounting* menjadikan laut sebagai aset dalam menata kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitas dan bisnis lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan laut sebagai bagian dalam sistem bisnis (Colgan, 2016; Koilo and Grytten, 2019; McIlgorm, 2016; Russell et al., 2017; Spalding, 2016).

Voyer et al. (2018), menyebutkan *blue accounting* adalah istilah yang semakin populer dalam tata kelola kelautan dan laut modern. Konsep ini berupaya mengawinkan peluang pembangunan berbasis laut dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. (Abreu et al., 2019a), mengeksplorasi kerangka pengetahuan kelautan secara umum dan *blue accounting* secara khusus, konsep ini merupakan pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip akuntansi tradisional dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam konteks sumber daya laut.

Menurut Abreu et al. (2019), *blue accounting* bertujuan untuk menciptakan standar baru yang dapat mengukur dan melaporkan nilai ekonomi dari ekosistem laut, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini p pengukuran tidak hanya dari dan hasil finansial, tetapi juga dari manfaat



sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan laut.

Graziano et al. (2019) menjelaskan konsep *blue accounting* berupaya untuk menjamin kelestarian sumber daya, lingkungan pesisir dan laut, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan dan perikanan. Phelan et al. (2020) mendeskripsikan konsep *blue accounting* bersinonim dengan konsep menghasilkan kekayaan dari aktivitas yang berhubungan dengan kelautan serta melindungi dan mendukung ekosistem laut. Penelitian lain oleh Minicante et al. (2022) menjelaskan konsep *blue accounting* berusaha untuk membatasi hilangnya keanekaragaman hayati sambil merangsang pembangunan ekonomi sehingga dapat mengintegrasikan kepentingan lingkungan dan ekonomi.

Di tengah tantangan global yang dihadapi oleh ekosistem laut, diperlukan suatu konsep yang muncul sebagai pendekatan inovatif untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Dalam pandangan Eikeset et al. (2018), yang dimaksud dengan pertumbuhan biru dari lingkungan laut tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut. Dalam konteks ini, merubah perilaku masyarakat menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi keberlanjutan laut.

Perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitas dilaut merupakan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem laut. Faktor-faktor seperti kesadaran lingkungan, partisipasi aktif, keadilan sosial, dan tingkat pendidikan merupakan elemen-elemen yang menjadi penyebab kerusakan dan menurunnya sumber daya laut (Bennett et al., 2019a; Kinch, 2020). Penelitian lain yang

oleh Brent et al. (2020); dan Farmery et al. (2021) menyebutkan faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem laut adalah kurangnya partisipasi dan



kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang dapat menghambat upaya pelestarian ekosistem laut.

Menurut Campling dan Colás, (2018), perilaku kapitalisme telah lama mendominasi cara manusia memahami dan memanfaatkan sumber daya laut, hal ini dapat terlihat dari banyak negara masih terjebak dalam paradigma kapitalisme tradisional yang menekankan pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Selanjutnya Roca Florido dan Padilla Rosa, (2024), mengungkapkan terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam hal pengumpulan data dan pengukuran nilai non-ekonomi dari kerusakan maupun hilangnya sumber daya laut.

Salah satu contoh kasus yang ditemukan oleh Childs dan Hicks, (2019) di Afrika, pengembangan *blue economy* sering kali didorong oleh kepentingan bisnis yang mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Misalnya, proyek penambangan mineral laut di pantai Afrika Barat telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah, sementara keuntungan yang diperoleh lebih banyak mengalir ke perusahaan multinasional ketimbang masyarakat lokal.

Mengutip dari laman <https://www.bappenas.go.id/>, Siaran Pers - Kamis, 25 November 2021. Di Indonesia, kerangka pembangunan *blue accounting* merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan pentingnya pengelolaan yang baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan



usnya di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai salah satu wilayah yang daerah kepulauan, juga harus ikut berperan aktif dalam pembangunan utan tersebut.

Kabupaten Aru adalah salah satu wilayah yang bercirikan daerah kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Sehingga mayoritas masyarakat kepulauan Aru hidup di wilayah pesisir, dan sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan lokal (nelayan tradisional). Hal ini membuat masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya laut, ketergantungan ini berbanding terbalik dengan perilaku masyarakat pesisir di desa Jabulenga dan Karangguli yang sering kali terjebak dalam perilaku kapitalisme tradisional untuk memperoleh keuntungan jangka pendek serta berpotensi merusak ekosistem laut dengan pola penangkapan ikan sistem *sero*.

Desa Jabulenga dan Karangguli, menggunakan praktik penangkapan ikan dengan sistem *sero* sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, sistem ini sering kali disalahgunakan, di mana nelayan menangkap ikan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut. Masyarakat pesisir, yang sebagian besar bergantung pada hasil laut untuk mata pencaharian, sering kali terpaksa mengambil risiko dengan cara menangkap ikan secara berlebihan, hal ini menciptakan dilema antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Penangkapan ikan dengan sistem *sero* sering kali membuat masyarakat terjebak dalam siklus eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan. Dengan menggunakan penangkapan ikan sistem *sero*, sumber daya laut dianggap sebagai komoditas yang harus dimaksimalkan produksinya tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Misalnya, penangkapan ikan yang berlebihan (*Overfishing*) telah menyebabkan penurunan populasi jenis ikan tertentu, yang berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat pesisir.



ktik *overfishing* atau penangkapan ikan yang berlebihan telah menjadi serius di wilayah pesisir desa Jabulenga dan Karangguli. Perilaku apaan yang melebihi kapasitas pemulihan stok ikan berdampak pada

penurunan populasi ikan yang drastis, hal ini tidak hanya mengancam kelestarian spesies ikan tertentu, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan.

Penangkapan ikan yang tidak terukur dengan sistem *sero* merupakan faktor penyebab penurunan volume tangkapan, termasuk ikan yang belum mencapai ukuran dewasa dan spesies ikan yang dilindungi. Dampak ini mengakibatkan penurunan biodiversitas dan mengganggu rantai makanan di laut. Cara kerja seperti penanaman tiang *sero* akan merusak terumbu karang dan hilangnya padang lamun, yang merupakan tempat berkembang biaknya ikan-ikan kecil, yang semakin memperparah situasi ini. Meskipun tujuan awal dari peningkatan aktivitas penangkapan ikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, namun dampak jangka panjangnya justru berlawanan.

Dalam menghadapi penurunan stok ikan yang signifikan, para nelayan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Mereka kini harus menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mencapai hasil tangkapan yang sama seperti sebelumnya. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga berpotensi mengurangi pendapatan mereka secara drastis. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan sumber daya pesisir mengalami tekanan yang sangat besar, terutama pada spesies ikan karang, udang, dan cumi-cumi yang telah dieksploitasi secara berlebihan (*over exploited*). Hal ini menciptakan siklus yang merugikan, di mana penurunan stok ikan memaksa nelayan untuk beroperasi lebih keras, meskipun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha yang

an. Berikut disajikan tabel data volume tangkapan ikan di pesisir in Aru tahun 2019 sampai 2023, sebagai berikut:



Tabel 1. 1 Estimasi Sumberdaya Perikanan Kepulauan Aru Tahun 2019 - 2023

Ekosistem Pesisir	Volume Tangkapan (ton)					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Ikan Pelagis Besar	839.973	398.283	709.276	626.368	797.730	Fully Exploited
Ikan Pelagis Kecil	818.870	597.810	647.045	631.240	634.730	Fully Exploited
Ikan Demersal	876.722	528.118	836.105	778.176	748.869	Fully Exploited
Ikan Karang	29.458	26.947	16.818	16.456	16.450	Over Exploited
Udang	62.842	86.550	52.277	50.274	50.050	Over Exploited
Cumi-Cumi	9.121	7.224	7.295	7.370	1.080	Over Exploited
Kepiting	1.498	6.320	5.751	6.567	7.780	Fully Exploited

Sumber: *Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Aru. Data diolah, (2024)

** ATSEA REPORT XPDC SAP Aru v2. Data diolah, (2024)

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 1.1, penurunan volume tangkapan ikan karang, udang, dan cumi-cumi yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa ketiga jenis organisme laut ini mengalami tekanan eksploitasi yang berlebihan. Volume ikan karang mengalami penurunan dari 29.458 ton pada tahun 2019 menjadi hanya 16.450 ton pada tahun 2023, sementara volume udang menurun dari 86.550 ton pada tahun 2020 menjadi 50.050 ton pada tahun 2023, kemudian cumi-cumi mengalami penurunan yang paling drastis, dari 9.121 ton pada tahun 2019 menjadi hanya 1.080 ton pada tahun 2023. Status “*Over Exploited*” pada ketiga jenis spesies ini menunjukkan bahwa tingkat penangkapan telah melampaui kapasitas regeneratif alami ekosistem ini, yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang lebih luas dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut di masa depan.

Bagian penting perairan desa Jabulenga dan Karangguli merupakan habitat bagi jenis – jenis mega fauna dilindungi seperti penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), duyung (*Dugong dugon*), dan lumba-lumba bungkuk (*Sousa sahulensis*). Pulau Mairang adalah pulau yang terletak pada wilayah perairan Desa Jabulenga, merupakan salah satu tempat habitat peneluran



ng ada di Kepulauan Aru, namun pulau ini rentan terjadi konflik dengan atan lahan dan penyalahgunaan lingkungan oleh masyarakat (ATSEA *XPDC SAP Aru v2 Tahun 2020).

Masyarakat pesisir desa Jabulenga dan Karangguli memiliki hubungan yang erat dengan laut, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perilaku kapitalisme yang tidak terkelola dengan baik telah mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Perilaku kapitalisme di masyarakat pesisir, dengan fokus pada akumulasi keuntungan, sering kali mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Masyarakat pesisir, yang bergantung pada sumber daya laut, sering kali terjebak dalam siklus eksploitasi yang merugikan. Misalnya, penangkapan ikan berlebih telah menjadi masalah serius pada wilayah pesisir, menyebabkan penurunan populasi ikan dan dampak negatif pada ekosistem laut.

Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi dilain sisi juga menciptakan ketidakadilan sosial. Masyarakat yang bergantung pada perikanan untuk kehidupan sehari-hari sering kali harus bersaing dengan perusahaan besar yang menggunakan teknologi canggih untuk menangkap ikan dalam jumlah banyak. Hal ini mengakibatkan hilangnya mata pencaharian bagi nelayan kecil.

Akuntansi lingkungan muncul sebagai disiplin ilmu yang penting dalam menilai sistem bisnis ekonomi. Berikut beberapa kajian ilmu akuntansi lingkungan dalam memandang sistem bisnis ekonomi seperti ditunjukkan dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam keputusan investasi, akuntansi lingkungan juga memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kemudian penerapan akuntansi lingkungan juga memperhatikan aspek *triple bottom line* yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hamsir et al., 2021).

Penelitian ini merupakan bagian dari kajian akuntansi lingkungan, yaitu *blue accounting* yang termasuk dalam ekonomi biru. Konsep ini berfokus keberlanjutan sumber daya laut, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan sambil melindungi lingkungan tanpa merusak ekosistem.



Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam mendorong penerapan konsep *blue accounting* yang lebih luas demi masa depan yang lebih berkelanjutan.

Terdapat lima aspek yang menjadi fokus dalam konsep *blue accounting* ketika mewakili pemangku kepentingan, seperti dikutip dalam (Abreu et al., 2017; Colgan, 2016; Failler et al., 2023; Syah et al., 2020), yaitu: (1) Jenis ikan di perairan, (2). Lahan basah pesisir, (3). Transportasi laut, (4). Pengendalian fosfor, (5). Sumber air. Berdasarkan uraian diatas maka fokus dan batasan penelitian ini adalah pada aspek pertama yaitu jenis ikan di perairan. Sehingga *blue accounting* akan menjadi konsep yang sangat penting untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Paradigma penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam memandang realita, permasalahan, dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan, dalam penelitian ini adalah paradigma kritis, dimana kenyataan dalam praktik perilaku masyarakat dalam menangkap ikan menggunakan sistem *sero* merupakan pola pikir masyarakat yang perlu di dekonstruksikan sehingga selalu dibawah hubungan kausal yang berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini nantinya dapat menjadi masukkan kepada masyarakat pesisir untuk perbaikan perilaku penangkapan ikan menggunakan sistem "*sero*" tanpa menghilangkan nilai-nilai (adat) yang melekat dalam budaya "*sero*".

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dampak dari penangkapan ikan yang tidak terkendali bukan hanya n keberlangsungan hidup ikan, tetapi juga mengancam mata ian masyarakat yang bergantung pada hasil tangkapan untuk bertahan alam konteks ini, masyarakat sering terjebak dalam siklus kapitalisme



tradisional yang cenderung memprioritaskan keuntungan jangka pendek, mengabaikan dampak jangka panjang dari praktik penangkapan ikan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir dan perilaku yang lebih terukur dan berkelanjutan, demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini berfokus pada penerapan konsep *blue accounting* dalam konteks masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut, khususnya nelayan yang menggunakan praktik penangkapan ikan sistem "*sero*".

Sistem *sero*, yang merupakan model tradisional dalam penangkapan ikan, mencakup pembagian wilayah laut dan pengelolaan sumber daya secara kolektif. Namun, dalam perspektif dekonstruksi ala Derrida, kita perlu mempertanyakan dualisme yang terbentuk antara manusia dan alam, serta antara ekonomi dan ekologi. Ketika masyarakat nelayan terjebak dalam logika ekonomi kapitalis, mereka sering kali mengabaikan keberlanjutan ekosistem laut yang seharusnya menjadi fondasi bagi mata pencaharian mereka. Dengan menerapkan analisis kritis Derrida, kita dapat melihat bagaimana praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan menciptakan ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi, yang pada akhirnya mengancam keseimbangan antara manusia dan alam.

Melalui pendekatan *blue accounting*, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat pesisir desa Jabulenga dan Karangguli tentang pentingnya menjaga keberlanjutan laut sebagai aset ekonomi. Dengan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya yang melekat pada sistem *sero*, sekaligus mengintegrasikan prinsip-prinsip

utan, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan praktik

apan ikan yang lebih bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya akan

akan manfaat langsung dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, tetapi



juga memastikan bahwa ekosistem laut tetap sehat dan produktif untuk generasi mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkritisi perilaku nelayan yang tidak berkelanjutan, tetapi juga menawarkan solusi yang menyeluruh dan berorientasi pada masa depan.

Fokus penelitian dapat diramu dengan pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana dekonstruksi perilaku “sero” nelayan Desa Jabulenga dan Desa Karangguli menurut konsep *Blue Accounting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Kritik yang ditunjukkan peneliti pada awal tulisan terkait perilaku yang dianut oleh nelayan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, khususnya melalui praktik penangkapan ikan menggunakan sistem *sero* yang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut, dapat mempengaruhi penurunan pendapatan nelayan, keberlanjutan ekosistem pesisir dan sumber daya laut.

Maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk dekonstruksi perilaku “sero” nelayan Desa Jabulenga dan Desa Karangguli dengan konsep *Blue Accounting*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoretis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan literatur terkait bidang ilmu akuntansi lingkungan di Indonesia khususnya, kajian terkait konsep *blue accounting* yang diterapkan pada masyarakat pesisir yang ketergantungan mata pencahariannya di laut. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dalam disiplin ilmu akuntansi lingkungan terkait dengan konsep *blue*



19.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah dapat menjadi masukan bagi masyarakat pesisir khususnya bagi daerah yang bercirikan kepulauan yang mana ketergantungan mata pencaharian masyarakatnya di laut, sehingga tujuan dari konsep *blue accounting* dapat tercapai bukan hanya untuk masyarakat modern dalam aktivitas bisnis perusahaan, tetapi juga dapat menyentuh masyarakat pesisir atau masyarakat (lokal) desa.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Disertasi ini menunjukkan bahwa sistem *sero* bukan sekadar teknik penangkapan ikan, tetapi juga mencerminkan nilai budaya dan spiritual masyarakat pesisir. Pembuat kebijakan perlu mengintegrasikan kearifan lokal ini dalam kebijakan pengelolaan laut agar tidak terjadi konflik sosial-budaya dan memastikan keberlanjutan ekologi berbasis praktik tradisional yang telah terbukti adaptif.

Disertasi ini mengembangkan *blue accounting* sebagai pendekatan akuntansi lingkungan yang tidak hanya menilai hasil ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan ekologis. Kebijakan publik dapat menggunakan model ini sebagai dasar penyusunan sistem akuntansi berbasis ekosistem dalam mengelola sumber daya laut di daerah kepulauan.

Temuan penelitian mengkritik sistem *sero* yang mengalami pergeseran ke arah eksploitasi berlebihan karena tekanan ekonomi. Pembuat kebijakan dapat merancang intervensi berbasis regulasi dan insentif untuk mendorong nelayan tetap mempertahankan tradisi *sero* tetapi dengan cara yang lebih berkelanjutan

larangan penggunaan bahan non-organik seperti pipa plastik, rotasi tangkapan, atau kuota tangkap).



Penelitian ini menegaskan pentingnya menjadikan masyarakat pesisir sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan kelautan. Kebijakan pengelolaan laut yang efektif harus dirancang dengan pendekatan partisipatoris, memastikan komunitas lokal terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis data *blue accounting* dan prinsip gotong royong (*masohi*).

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *blue accounting*, pembuat kebijakan dapat mengembangkan indikator keberlanjutan multidimensi (ekonomi, sosial, lingkungan) untuk menilai keberhasilan kebijakan pengelolaan laut, tidak hanya dari segi volume tangkapan atau PDB sektor perikanan, tetapi juga dari keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir.

1.5 Sistematis Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisi penjelasan mengapa penelitian ini dilaksanakan pada bagian 1.1 latar belakang. Menjelaskan fokus penelitian atau rumusan masalah pada bagian 1.2 menjelaskan tujuan penelitian pada bagian 1.3 dan menjelaskan kegunaan penelitian dari aspek teori maupun praktis pada bagian 1.4. adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada bab 2. dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada bab 3. Bab 4 pada penelitian ini menjelaskan bagaimana kritik perilaku *sero* yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Bab 5 penelitian ini mendekonstruksi perilaku penangkapan ikan dengan nilai konsep *blue accounting*. Bab 6-10 mendeskripsikan model nilai *blue accounting* yang dibangun berdasarkan budaya dan kearifan lokal masyarakat

ab 11 penutup terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan, dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi *Blue Accounting*

Blue accounting adalah penciptaan yang didasarkan pada pengetahuan kelautan yang dimulai dengan laut dan lautan sebagai aset ekonomi biru (Mandeng et al., 2022). Inisiatif *blue accounting* dipimpin oleh komisi *Great Lakes* dalam kemitraan dengan *The Nature Conservancy*.

Blue accounting merupakan kebutuhan yang berkontribusi pada ekonomi, iklim, ekosistem laut, dan cara hidup manusia untuk mengubah arah saat ini dan memetakan masa depan laut yang berkelanjutan (Winarsih et al., 2020). *Blue accounting* adalah tata cara untuk mengukur nilai-nilai non pasar dalam kaitan dengan kerusakan terumbu karang, hilangnya ekosistem sebagai akibat dari pencemaran lingkungan laut. Hal-hal ini biasanya tidak terdata oleh pihak pemangku kepentingan misalnya dinas Kelautan dan Perikanan, dan juga lembaga pemerhati lingkungan. *Blue accounting* diperlukan sebagai upaya berkelanjutan untuk mengukur nilai sumber daya alam, yang pada gilirannya menjadi landasan dalam menilai apakah pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan ini juga berfungsi untuk menghargai berbagai barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem (Spalding, 2016). Dengan demikian, *blue accounting* tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan ekonomi yang seimbang dan ramah lingkungan.



e accounting, sebagaimana dijelaskan oleh Abreu et al. (2019b),
an suatu pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan kelautan

dengan pengakuan terhadap kondisi sumber daya laut di masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Konsep ini tidak hanya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik akuntansi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur sumber daya dan peluang yang ada dalam domain maritim. Dengan memanfaatkan kecerdasan manusia, *blue accounting* berupaya mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh sumber daya laut, sambil tetap mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan. Tujuan utama dari penerapan standar *blue accounting* adalah untuk menetapkan perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang relevan dengan aktivitas maritim, sehingga menciptakan keterhubungan yang harmonis antara pengelolaan sumber daya laut dan praktik akuntansi yang transparan dan akuntabel.

Isu keberlanjutan menarik perhatian berbagai pihak seperti organisasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika konferensi tingkat tinggi tentang lingkungan pada tahun 1972. Untuk pertama kalinya diakui bahwa telah terjadi konflik antara etika lingkungan dan pembangunan berkelanjutan merupakan masalah yang dihadapi oleh model ekonomi dunia yang masih menggunakan akuntansi dan keuangan konvensional Gray, 1992 dalam (Syah et al., 2020). Di Indonesia konsep ini termuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah untuk pembangunan berkelanjutan baik itu di darat dan laut.

Beberapa peneliti beranggapan bahwa akar penyebab masalah lingkungan muncul karena antroposentris (Rustomjee, 2016). Antroposentris mendorong manusia untuk mencapai tujuan menguasai alam. Bahkan memicu perang bukan lagi konflik yang bersifat lokal melainkan global. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia bermanuver pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio 20 di Brasil pada



di 1992 untuk mewujudkan sektor kelautan sebagai *leading* sektor yang akan sektor lain. Indonesia yang merupakan negara Kepulauan di dunia (sebanyak ± 13.478 pulau) memiliki permasalahan yang sangat

kompleks, misalnya dalam hal eksploitasi dan penyusutan yang berkontribusi pada biaya sosial yang harus dibayar oleh masyarakat (Zais and Samiun, 2022).

Kasus kelestarian laut di Indonesia mencerminkan dampak negatif dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, di mana eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam telah mengakibatkan penurunan daya saing di berbagai sektor. Fenomena ini sejalan dengan konsep *Dutch Disease*, yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seringkali mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat (Prasetyo, 2020). Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, kenyataannya adalah terjadi penurunan daya saing dan kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dari pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa pengertian *blue accounting* tidak hanya terfokus pada biaya lingkungan yang melindungi hak pemilik modal, melainkan juga berupaya menjamin keseimbangan antara kebutuhan makhluk hidup dan kemampuan alam dalam menyediakan sumber daya. *Blue accounting* muncul sebagai dukungan terhadap program ekonomi biru yang digagas oleh Pemerintah Indonesia, sejalan dengan pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa berbagai jalur menuju ekonomi biru sangat bergantung pada prioritas serta tujuan nasional dan lokal (PBB, New York 2017). Dengan demikian, *blue accounting* tidak dimaksudkan untuk menyaingi akuntansi hijau, melainkan untuk melengkapi kajian yang sering terlewat dalam konteks akuntansi lingkungan. Pendekatan ini menegaskan

synergy antara berbagai disiplin ilmu dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.



2.2 Fokus dan Tujuan *Blue Accounting*

Blue accounting menyoroti pentingnya kehidupan ekosistem laut sebagai aset ekonomi yang berharga, berbeda dengan akuntansi hijau yang lebih terfokus pada pengurangan emisi karbon. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, keduanya berbagi tujuan yang sama, yaitu mencapai keberlanjutan. Kehadiran *blue accouting* tidak dimaksudkan untuk menentang akuntansi hijau, melainkan justru memperkuat posisi akuntansi lingkungan yang ada saat ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perkembangan dalam bidang akuntansi ini berimplikasi positif bagi profesi akuntansi, di mana para akuntan diharapkan tidak hanya berperan dalam pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai pembuat aturan yang mendukung keberlanjutan (Syah et al., 2020). Dengan demikian, integrasi antara akuntansi biru dan hijau dapat menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Blue accounting menyoroti pentingnya keberlanjutan ekosistem laut, yang mencakup 72% dari total luas permukaan bumi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan di kawasan Great Lakes dan Sungai St. Lawrence, dengan fokus utama pada kualitas air dan penerapan prinsip triple bottom line yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, terdapat lima fokus utama yang mencerminkan beragam kepentingan dan pemangku kepentingan, yaitu: (1) pemantauan jenis ikan di perairan, (2) pelestarian lahan basah pesisir, (3) pengembangan sistem transportasi laut yang efisien, (4) pengendalian fosfor untuk menjaga kualitas air, dan (5) pengelolaan sumber air yang berkelanjutan (Abreu et al., 2017; Colgan, 2016; J. Liu et al., 2024; Syah et al., 2020).

Lebih lanjut, Abreu et al. (2019b) menjelaskan bahwa *blue accounting* dapat

tkan sebagai alat untuk menganalisis ekonomi biru, dengan tujuan utama

atkan kesadaran masyarakat dan organisasi terhadap pentingnya

aan ekosistem laut yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini,



diharapkan dapat tercipta sinergi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga ekosistem laut dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Dalam hal pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, *blue accouting* muncul sebagai konsep yang tidak hanya memetakan aset maritim, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong ekonomi kelautan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Menurut Lee et al. (2020), konsep ini mengajak kita untuk berpikir secara mendalam tentang kemaritiman dan potensi yang terkandung di dalamnya. Abreu et al. (2017) menambahkan bahwa *blue accouting* dapat menjadi momentum penting dalam pemetaan informasi yang berkelanjutan, di mana pemangku kepentingan yang terlibat dalam investasi dan pendanaan di sektor kemaritiman dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan laporan keuangan yang transparan. Dengan demikian, *blue accouting* tidak hanya memperkuat posisi akuntansi lingkungan, tetapi juga mendorong para akuntan untuk mengalihkan fokus mereka kepada ekosistem laut yang kaya akan sumber daya alam, yang sayangnya sering kali tidak terkelola dengan optimal.

2.3 Konsep *Blue Accounting*

Blue accounting adalah suatu pendekatan yang berakar dari konsep ekonomi biru, yang menekankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan baik di darat maupun di laut. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan kawasan pesisir, pengelolaan komoditas masyarakat, inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan terhadap sumber daya alam, serta pemeliharaan sektor pariwisata pantai. Fokus utama dari

biru ini ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor kelautan dan perikanan, yang berlangsung dari tahun 2013 hingga 2018. Oleh karena itu, implementasi *blue accouting* seharusnya menjadi perhatian



serius bagi semua pihak, agar sektor kelautan dan perikanan, yang merupakan salah satu keunggulan di daerah kepulauan, dapat terjaga kelestariannya. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat setempat (Malerba et al., 2023).

Penerapan konsep *blue accouting* harus terintegrasi dengan program industrialisasi yang berkelanjutan dalam sektor kelautan dan perikanan. Tujuan utama dari implementasi *blue accouting* adalah untuk menciptakan kondisi biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Zais and Samiun, 2022). Kebijakan strategi *blue accouting* diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dengan memanfaatkan sumber daya laut secara bijaksana, sehingga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat mata pencaharian masyarakat pesisir dan melestarikan ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, model pendekatan *blue accouting* menjadi landasan strategis yang mendorong transformasi struktur dan pola pembangunan untuk mencegah eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Dengan menggeser fokus dari praktik perekonomian yang mengutamakan keuntungan jangka pendek, pendekatan ini menekankan pentingnya transisi menuju ekonomi rendah karbon, sehingga upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi dapat terlaksana secara efektif. Dengan demikian, *blue accouting* tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan ekonomi, tetapi juga sebagai pendorong keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.



konsep *blue accouting* memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pesisir, terutama bagi mereka yang bergantung pada sumber daya laut, seperti nelayan. Penerapan *blue accouting* di lingkungan

ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengukur dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem laut, tetapi juga sebagai sarana untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, masyarakat pesisir dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana interaksi mereka dengan lingkungan laut mempengaruhi kesejahteraan mereka dan kesehatan ekosistem.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan dalam berbagai penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa penerapan *blue accouting* dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pengelolaan sumber daya laut yang bertanggung jawab (Abreu et al., 2017; Colgan, 2016; Syah et al., 2020). Dengan demikian, integrasi konsep *blue accouting* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

2.3.1 Pengukuran Biaya Lingkungan

Da-Rocha et al. (2019) dalam penelitiannya mengemukakan biaya sumber daya masyarakat pesisir dapat mengidentifikasi biaya yang terkait dengan pengambilan sumber daya laut, seperti biaya pemeliharaan alat penangkapan ikan, biaya operasional, dan biaya yang muncul akibat pencemaran air, seperti biaya kesehatan masyarakat dan rehabilitasi ekosistem.

Biaya eksternal merupakan pengeluaran yang tidak terlihat, seperti kerusakan terumbu karang atau berkurangnya kualitas air akibat limbah, dapat dihitung untuk merefleksikan dampak ekonomi dari aktivitas penangkapan ikan, termasuk dampak jangka panjang terhadap produktivitas sumber daya (Nagy dan

2021).

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al. (2018), ditekankan kriteria lingkungan memainkan peran vital sebagai pilar utama dalam



mendukung praktik berkelanjutan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai risiko dan peluang non-keuangan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, penelitian ini juga berfokus pada perilaku penangkapan ikan yang menggunakan sistem sero, yang diidentifikasi sebagai metode tradisional dalam menangkap ikan di laut, yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Jabulenga dan Karangguli.

Fokus utama adalah pada pengelolaan lingkungan laut, yang sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir, pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian ekosistemnya. Sehingga laut sebagai aset vital bagi masyarakat pesisir, dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya harus dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut, masyarakat pesisir dapat meraih keuntungan saat ini tanpa mengorbankan atau mengurangi nilai sumber daya untuk generasi mendatang.

2.3.2 Penerapan Praktik Berkelanjutan

Laporan keberlanjutan yang disusun oleh masyarakat nelayan, sebagaimana diuraikan oleh (Pane et al., 2021), memiliki potensi besar untuk mencerminkan praktik perikanan yang berkelanjutan. Dalam laporan tersebut, informasi yang disajikan tidak hanya mencakup jumlah ikan yang ditangkap, tetapi juga ukuran populasi ikan yang ada serta langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, laporan ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif, memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya masyarakat nelayan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Melalui pendekatan yang komprehensif, masyarakat nelayan tidak hanya menunjukkan tanggung jawab terhadap



lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan praktik perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan (Maghfira et al., 2023).

Indikator kinerja merupakan mengembangkan indikator untuk memonitor kesehatan ekosistem, seperti keanekaragaman hayati, kualitas air, dan kestabilan populasi ikan. Teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan harus mengadopsi teknik menangkap ikan yang tidak merusak ekosistem, seperti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, untuk mengurangi dampak penangkapan ikan yang berlebihan dan menjaga populasi ikan.

Pengelolaan sumber daya terbarukan mengimplementasikan metode yang berorientasi pada kelestarian, seperti penangkapan ikan terencana yang mempertimbangkan musim dan populasi, serta praktek budidaya yang mengurangi tekanan pada sumber daya alam (Syarifuddin and Damayanti, 2019; Vega-Muñoz et al., 2021).

Dalam aktivitas tangkap masyarakat pesisir, *blue accouting* juga menyoroti aspek sosial dari perikanan. Hal ini mencakup penilaian terhadap taraf hidup nelayan, ketenagakerjaan di sektor perikanan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta dampak sosial dari perubahan kebijakan perikanan. Dengan memperhatikan aspek sosial ini, *blue accouting* membantu dalam memastikan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir terjaga.

Secara keseluruhan, *blue accounting* merupakan alat yang sangat berguna dalam aktivitas tangkap masyarakat pesisir. Dengan menyatukan informasi ekonomi, lingkungan, dan sosial, konsep ini membantu dalam menciptakan keselarasan antara pemanfaatan sumber daya laut dan keberlanjutan ekosistem.

Melalui penerapan *blue accouting*, masyarakat pesisir dapat mengoptimalkan

ekonomi dari perikanan, melindungi lingkungan laut, dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.



2.3.3 Kesadaran tentang Ekosistem dan Keberagaman Hayati

Ertör dan Hadjimichael. (2020), memberikan pemahaman terkait dengan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya melestarikan ekosistem laut dan dampak dari praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Masyarakat pesisir perlu mengetahui penilaian nilai ekosistem dalam menghitung nilai ekonomi dari layanan ekosistem, seperti penyediaan makanan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan terhadap bencana alam (seperti penangkapan ikan mendorong keanekaragaman hayati yang mendukung ketahanan lingkungan).

Analisis dampak lingkungan untuk memahami dampak perubahan lingkungan, seperti pencemaran atau perubahan iklim, terhadap mata pencaharian nelayan dan ekosistem pesisir. Masyarakat pesisir perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung praktik perikanan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya laut yang baik (Fontes et al., 2019).

Konsep *blue accounting* membantu masyarakat pesisir dalam memahami dampak aktivitas perikanan terhadap lingkungan laut. Dengan informasi yang lebih akurat mengenai kerusakan habitat, polusi laut, dan perubahan iklim, masyarakat dapat mengidentifikasi praktik perikanan yang ramah lingkungan. Dengan menjaga keseimbangan ekologi, *blue accounting* membantu melindungi ekosistem laut, yang merupakan aset penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pemantauan yang cermat terhadap data perikanan, masyarakat dapat menerapkan praktik penangkapan yang berkelanjutan, menghindari pemanfaatan berlebihan, serta menjaga keberagaman spesies ikan. Hal ini akan menghasilkan

tan populasi ikan dan menjaga kelangsungan hidup sumber daya laut, a akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan cat pesisir.



2.3.4 Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat pesisir dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya, agar mereka memiliki suara dalam menjaga kelestarian ekosistem yang juga menjadi sumber penghidupan mereka (Bethel et al., 2021a). Masyarakat pesisir perlu mengembangkan asosiasi nelayan yang berfokus pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan. Dengan menerapkan konsep *blue accounting* dalam kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas nelayan, akan tercipta kesadaran dan praktik yang lebih baik dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini tidak hanya mendukung daya hidup dan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian ekosistem secara keseluruhan.

Konsep *blue accounting* mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Dengan menyediakan informasi yang transparan dan mudah dipahami mengenai aktivitas perikanan, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan (Pattinaja et al., 2023). Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingan mereka, mempengaruhi kebijakan perikanan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Selain aspek ekonomi dan lingkungan, *blue accounting* juga memperhatikan aspek sosial dari perikanan. Dengan menilai dampak aktivitas perikanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, *blue accounting* membantu dalam memastikan bahwa kegiatan perikanan memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat pesisir. Hal ini mencakup peningkatan taraf hidup nelayan,



peningkatan infrastruktur sosial, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesempatan untuk bersosialisasi dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan religius.

2.4 Keberlanjutan Laut sebagai Aset Akuntansi Biru

Dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas manusia kini semakin nyata, sehingga peran pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip pengorganisasian dalam berbagai konteks kebijakan dan pada berbagai skala menjadi sangat penting (Bebbington and Larrinaga, 2014). Penelitian ini mengungkap dua implikasi signifikan; pertama, masalah-masalah yang bersifat moral yang perlu ditangani semakin kompleks, menuntut kita untuk mengadopsi inovasi dalam cara berpikir. Kedua, munculnya ruang baru yang memberikan kesempatan bagi akademisi untuk mengeksplorasi proses pembuatan, validasi, dan penerjemahan pengetahuan, baik dalam konteks pengaturan kebijakan maupun praktik. Salah satu hasil yang mencolok dari tren ini adalah lahirnya aliran kerja dalam ilmu keberlanjutan, yang secara aktif menyelidiki bagaimana berbagai disiplin ilmu dapat berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan yang mendukung kemajuan pembangunan berkelanjutan (Bebbington and Larrinaga, 2014). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti tantangan yang ada, tetapi juga memberikan wawasan tentang potensi inovasi dalam mendukung keberlanjutan di masa depan.

Pembangunan berkelanjutan, yang kini menjadi fokus utama dalam berbagai diskusi global, berakar dari konsep akuntansi lingkungan, yang pada dasarnya merupakan perluasan dari akuntansi sosial (Rickels et al., 2019). Sejak awal tahun sembilan puluhan, akuntansi lingkungan telah dipengaruhi oleh beragam ide yang diadopsi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sains dan ekonomi, yang mendorong inovasi serta lahirnya literatur baru dalam bidang ini (Estes et al., 2021). Ketika akuntansi lingkungan mulai diintegrasikan ke dalam struktur departemen

i, perhatian para profesional beralih kembali kepada isu-isu akuntansi inti, akuntansi manajemen, audit keuangan, akuntansi keuangan, serta analisis keuangan (Damayanti and Syarifuddin, 2020). Di samping itu, praktik audit



lingkungan dan pelaporan yang independen juga mulai mendapatkan perhatian yang signifikan. Meskipun pembangunan berkelanjutan sering kali dianggap sebagai istilah yang terlibat dalam wacana politik mengenai aktivitas dan perilaku manusia, sebagaimana diungkapkan oleh (Bebbington and Larrinaga, 2014), elemen-elemen evaluasi lingkungan tetap dapat diukur secara ilmiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam terkait ontologi dan epistemologi, yang menjadi tantangan bagi para peneliti dan praktisi dalam memahami dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan secara efektif.

Kesimpulannya, meskipun kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa masalah lingkungan memiliki dimensi fisik yang kompleks dan tidak selalu dapat diprediksi, penting untuk menegaskan bahwa akuntansi untuk pembangunan berkelanjutan seharusnya berlandaskan pada pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan antara pengetahuan yang terbatas tentang fenomena yang terjadi dalam sistem alam dan kontestabilitas sosial yang berfungsi sebagai objek pengetahuan.

Posisi ontologis ini tidak hanya memperkaya perspektif kita, tetapi juga menimbulkan sejumlah implikasi epistemologis yang signifikan. Sebagai contoh, pengenalan konsep pembangunan berkelanjutan telah mendorong munculnya keinginan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi dalam menangani tantangan lingkungan global serta isu-isu pembangunan yang saling berkaitan (Boiral, 2013). Dengan demikian, pemahaman yang holistik dan kolaboratif menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan.

Salah satu alasan utama yang mendasari intensitas upaya untuk mengukur ekonomi secara eksplisit adalah untuk memungkinkan diskusi mengenai alam kerangka ekonomi yang setara dengan isu-isu ekonomi lainnya. an antara lautan dan ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa



pembuatan kebijakan memperhitungkan nilai yang dimiliki oleh sumber daya laut. Dengan demikian, estimasi kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional yang dinyatakan dalam istilah moneter tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang peran lautan, tetapi juga memungkinkan perbandingan yang lebih adil dengan sektor sumber daya lainnya dalam perhitungan pendapatan nasional (Buckley, 2012).

Dalam hal ini, nilai-nilai ekonomi yang terkait dengan lautan bukan hanya sekadar angka, melainkan juga mencerminkan dinamika politik yang berperan penting dalam proses pembuatan kebijakan. Meskipun lautan adalah aspek geografis yang mendominasi permukaan planet ini dan menyentuh batas sebagian besar negara, hubungan yang terjalin antara negara dan lautan juga menunjukkan kompleksitas yang signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pengukuran barang dan jasa lingkungan memiliki sejumlah keterbatasan yang patut diperhatikan. Salah satu isu utama adalah bahwa pengeluaran yang diarahkan untuk memperbaiki atau memulihkan dampak negatif dari kerusakan lingkungan terhadap aset fisik, seperti upaya menghindari polusi lokal melalui perubahan tempat tinggal atau pekerjaan, proses pembersihan dan pemulihan bangunan, serta pengeluaran untuk perawatan kesehatan bagi individu yang terdampak, tidak tercakup dalam akuntansi *System of Environmental and Economic Accounting* (SEEA). Meskipun demikian, terdapat kemungkinan untuk memasukkan pengeluaran tersebut ke dalam akuntansi jika informasi yang relevan tersedia (Colgan, 2016). Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan metodologi yang lebih komprehensif dalam pengukuran dampak lingkungan, agar

it lebih akurat dalam mencerminkan nilai dan biaya yang sebenarnya ngan kerusakan lingkungan.



System of Nationals Accounts (SNA) merupakan seperangkat rekomendasi standar yang diakui secara internasional mengenai metode penyusunan ukuran kegiatan ekonomi, yang penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan konsisten tentang kondisi ekonomi suatu negara. Dalam konteks Asia Tenggara, isu kompitabilitas data akuntansi nasional menjadi sangat krusial, terutama ketika mempertimbangkan studi-studi regional di kawasan Samudera Hindia, sebagaimana diungkapkan oleh Moica Paulo et al. (2015).

Hal ini semakin diperkuat oleh hasil pertemuan tingkat Menteri Kelautan pada tahun 2005, yang diadakan dalam *kerangka Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan menghasilkan Bali Plan of Action. Rencana ini menekankan prioritas terhadap pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, yang sejalan dengan upaya untuk meningkatkan integrasi data dan akuntansi dalam konteks ekonomi maritim di kawasan tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang SNA dan kompitabilitas data menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di Asia Tenggara. Pada tahun 2005 pertemuan tingkat Menteri Kelautan terkait lautan Kelautan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang kedua menghasilkan *Bali Plan of Action* yang memprioritaskan pada:

“Memahami nilai sektor kelautan: Pemahaman yang lebih baik tentang nilai pasar dan non-pasar jangka pendek dan jangka panjang dari sektor kelautan akan memungkinkan para pemangku kepentingan dan pembuat keputusan untuk mencapai pengelolaan kelautan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pelajari nilai pasar dan non-pasar lingkungan laut dan industri kelautan di kawasan Asia Pasifik, termasuk dengan melakukan penelitian, komunikasi, dan pertukaran informasi tentang aktivitas kelautan (APEC, 2005)”.

Dorongan untuk mengukur kelautan melalui *blue accouting* di tingkat nasional menunjukkan variasi yang signifikan antar negara, mencerminkan



itas dan keragaman dalam pengelolaan sumber daya laut. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pengatur berbagai aktivitas kelautan sangat krusial, lapat mendorong pengembangan profil ekonomi kelautan yang lebih

berkelanjutan dan terintegrasi. Namun, tantangan muncul ketika setiap kategori kegiatan, seperti pelayaran, penangkapan ikan, dan sektor-sektor lainnya, umumnya berada di bawah pengawasan menteri dan departemen yang berbeda, sehingga sering kali tidak ada satu lembaga tunggal yang mampu mengkaji dan memanfaatkan informasi ekonomi kelautan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran akan isu-isu kelautan, yang tercermin dalam buruknya struktur tata kelola di sektor ini (Rustomjee, 2016). Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi dalam pengelolaan ekonomi kelautan, agar potensi sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

2.5 Praktik Perilaku Penangkapan Ikan Menggunakan Budaya Sero

Budaya *sero* di Desa Jabulenga dan Karangguli mencerminkan suatu sistem sosial yang kompleks dalam pengelolaan sumber daya laut, di mana nelayan mengatur wilayah tangkap dan harta warisan secara gotong royong. *Sero*, yang berfungsi sebagai alat penangkapan ikan, dimiliki oleh individu, keluarga, atau kelompok, dan penempatannya di pesisir pantai telah diatur dengan ketat berdasarkan tradisi dan norma yang diwariskan oleh tokoh adat setempat. Penempatan lokasi *sero* tidak hanya mencerminkan hak milik, tetapi juga tanggung jawab sosial yang mengikat komunitas nelayan.

Namun, praktik ini sering kali terjebak dalam ketidakfleksibelan, di mana lokasi *sero* yang telah ditetapkan sejak zaman dahulu tidak dapat dipindahkan, meskipun kondisi lingkungan dan kebutuhan ekonomi mungkin telah berubah. Hal



akibatkan potensi konflik antar nelayan dan menghambat inovasi dalam penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi nelayan di kedua desa ini untuk mengevaluasi dan mengadaptasi

sistem *sero* mereka, agar dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan respons terhadap perubahan kondisi lingkungan serta tuntutan ekonomi modern.

Berkaitan pengaturan penempatan *sero* di Desa Jabulenga dan Desa Karangguli, kita perlu mempertimbangkan bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan sumber daya laut, tetapi juga sebagai refleksi dari identitas budaya masyarakat Kepulauan Aru. Penempatan *sero* yang mengikuti marga asli desa tersebut mencerminkan nilai lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, penting untuk mengkritisi perilaku nelayan pesisir dalam menjalankan sistem ini, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap hak wilayah adat (*Petuanan laut*) yang telah disepakati oleh tokoh adat.

Ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam penempatan *sero* dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan merusak tatanan sosial yang telah dibangun. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif di kalangan nelayan untuk menghormati dan melestarikan sistem *sero* ini, agar tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme yang efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya laut demi kesejahteraan bersama.

Dalam hal perilaku nelayan pesisir di Desa Jabulenga dan Karangguli, sistem *sero* yang dijelaskan oleh Bapak Samuel Kaitian, seorang tokoh adat setempat, mencerminkan tradisi dan kepercayaan yang kaya. Dalam bahasa daerah, budaya *sero* dikenal sebagai "*manumbay*" atau "*Er*", yang menunjukkan kedalaman hubungan masyarakat dengan lingkungan laut. Sistem *sero* ini memiliki beberapa jenis, seperti *sero* dua puluh dua, *sero* enam belas, *sero* empat belas, *sero* dua belas, dan *sero* sepuluh, yang ditentukan oleh jumlah "*gudang sero*".



, *sero* enam belas memiliki enam belas gudang, mencerminkan identitas dan struktur yang terorganisir dalam praktik penangkapan ikan. Bagian dari *sero*, mulai dari "*belo pamali*" atau "*kajau-gasira*" (*tiang sakral*

sero) hingga kaki *sero*, memiliki makna simbolis yang mendalam dan berfungsi sebagai panduan dalam aktivitas nelayan.

Panjang *sero* yang bervariasi antara tujuh hingga lima belas meter menunjukkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan spesifik nelayan. Namun, penting untuk mengkritisi bagaimana tradisi ini berinteraksi dengan tantangan modern, seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan perubahan iklim, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan praktik ini dan ekosistem laut. Dengan demikian, pemahaman yang lebih dalam tentang sistem *sero* bukan hanya sekadar menghargai warisan budaya, tetapi juga sebagai langkah proaktif dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan keberlanjutan lingkungan.

Perilaku nelayan pesisir di Desa Jabulenga dan Karangguli, sistem *sero* yang dijelaskan oleh Bapak Samuel Kaitian menunjukkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Bahan baku *sero* yang terdiri dari bambu, tali rotan (*jula*), dan kayu bakau (yang dalam bahasa daerah dikenal sebagai kayu "*tanggir*") mencerminkan nilai lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Proses pembuatan *sero* yang dilakukan secara "*masohi*" atau gotong royong menegaskan pentingnya kolaborasi dalam masyarakat nelayan, di mana setiap individu berkontribusi untuk memotong bambu, menganyam, dan menanam *sero*. Namun, tradisi penempatan *sero* yang diwariskan secara turun-temurun menciptakan batasan bagi keluarga yang ingin menambah lokasi *sero*, di mana setiap keluarga memiliki hak atas tempat tertentu di laut yang tidak bisa diubah.

Keluarga yang belum memiliki lokasi *sero* dapat menyewa tempat tersebut dengan harga bervariasi antara Rp 1.500.000 hingga Rp 3.000.000 per gan, mencerminkan nilai ekonomi yang melekat pada sistem ini. Sistem ini memperkuat ikatan sosial di antara nelayan, perlu dicermati praktik penyewaan ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi mereka



yang tidak mampu membayar sewa, sehingga penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap dampak sosial dan ekonomi dari sistem sero ini dalam konteks keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Praktik tradisional di Desa Jabulenga dan Desa Karangguli menunjukkan bahwa hasil tangkapan pertama dari sistem sero tidak dimaksudkan untuk dijual. Sebaliknya, nelayan setempat melaksanakan ritual pengucapan syukur dengan membagikan hasil tangkapan kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pembuatan sero. Dalam tradisi ini, pemilik sero memilih ikan terbesar dari hasil tangkapan pertama, yang kemudian dibakar dan dinikmati bersama-sama.

Meskipun pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan nilai lokal, penting untuk mengkritisi apakah praktik ini dapat berkelanjutan dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih luas, mengingat tantangan lingkungan yang dihadapi oleh ekosistem pesisir saat ini. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan praktik pengelolaan yang lebih berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan sumber daya perikanan di masa depan.

Dalam tradisi masyarakat pesisir Desa Jabulenga dan Karangguli, terdapat sebuah praktik yang menarik terkait dengan sistem sero yang digunakan nelayan setempat. Masyarakat percaya bahwa jika hasil tangkapan ikan terbaik, yang sering disebut sebagai ikan *pamali*, dikonsumsi secara bersama-sama, maka hasil tangkapan berikutnya akan berlimpah, sebanding dengan jumlah orang yang menyantap ikan pertama dari sero tersebut. Selanjutnya, tulang ikan yang telah dimakan akan dibungkus dengan daun pisang dan disimpan di pohon yang dihuni banyak semut.



Praktikan ini mengakui bahwa semakin banyak semut yang mengerumuni di dalam daun pisang, semakin melimpah pula ikan yang akan ditangkap mendatang. Penting untuk dicatat bahwa bahan baku pembuatan sero

harus tetap menggunakan material tradisional, karena penggantian dengan bahan modern seperti besi atau pipa plastik akan mengikis nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, praktik-praktik ini tidak hanya mencerminkan budaya lokal, tetapi juga menegaskan pentingnya pelestarian budaya dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Sistem *sero*, sebagai alat tangkap yang digunakan oleh nelayan pesisir di desa Jabulenga dan Karangguli, memiliki siklus penggunaan yang menarik dan mencerminkan tradisi lokal yang kuat. Alat ini biasanya bertahan di laut selama tiga hingga empat bulan, setelah itu nelayan akan menggantinya dengan yang baru, terutama jika musim tangkapan ikan sedang baik. Proses penanaman *sero* ini tidak bisa dianggap sepele, karena masyarakat setempat memiliki tradisi yang ketat terkait waktu dan cara pelaksanaannya.

Penanaman *sero* harus dilakukan pada hari Jumat, dan tidak ada pengecualian untuk hari lainnya. Selain itu, sebagai bagian dari ritual, nelayan diwajibkan untuk menyisipkan emas atau perhiasan dari emas murni ke dalam tiang pamali saat menanam *sero*. Praktik ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga mencerminkan hubungan spiritual antara nelayan dan laut, di mana kepercayaan akan keberuntungan dan hasil tangkapan yang melimpah sangat dipengaruhi oleh cara dan waktu penanaman *sero*. Namun, perlu dicermati bahwa meskipun tradisi ini menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, dampak lingkungan dari penggunaan *sero* yang berulang kali dan potensi penurunan populasi ikan dapat menjadi isu yang perlu diatasi demi keberlanjutan sumber daya laut di masa depan.



Penemuan Penelitian (*Research Gaps*)

Am konteks penelitian dekonstruksi perilaku "*sero*" nelayan di Desa a dan Desa Karangguli, terdapat beberapa celah yang perlu diidentifikasi,

terutama ketika dikaitkan dengan konsep *blue accounting*. Beberapa studi sebelumnya telah menganalisis perilaku nelayan dari sudut pandang ekonomi dan ekologi, namun sering kali analisis tersebut masih terjebak dalam dualisme yang kaku antara manusia dan alam, serta ekonomi dan ekologi.

Penelitian-penelitian ini cenderung tidak mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana interaksi antara kedua aspek tersebut dapat saling mempengaruhi dan membentuk perilaku nelayan yang tidak berkelanjutan. Dengan pendekatan dekonstruksi ala Derrida, penting untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari perilaku nelayan dan mengeksplorasi bagaimana narasi yang ada dapat membentuk pemahaman mereka terhadap sumber daya laut.

Salah satu penelitian yang relevan adalah yang dilakukan oleh García-Lorenzo et al. (2021), penelitian ini menyajikan analisis komparatif mengenai praktik perikanan tradisional dan modern di berbagai belahan dunia, dengan fokus pada sistem manajemen sumber daya perikanan dan pengalaman pengelolaan perikanan yang berbeda di negara-negara seperti Uni Eropa, Islandia, Australia, dan Selandia Baru. Namun kurang memberikan perhatian pada aspek ekologi dan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sumber daya laut.

Di sisi lain, penelitian oleh Mulazzani dan Malorgio (2017) membahas konsep pertumbuhan biru (*blue growth*) dan bagaimana hal ini berhubungan dengan layanan ekosistem yang disediakan oleh lingkungan laut. Pertumbuhan biru adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut. Selanjutnya penelitian oleh Comte et al. (2022), menyebutkan bahwa akuntansi ekosistem

an alat yang penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem ke ngambilan keputusan ekonomi.



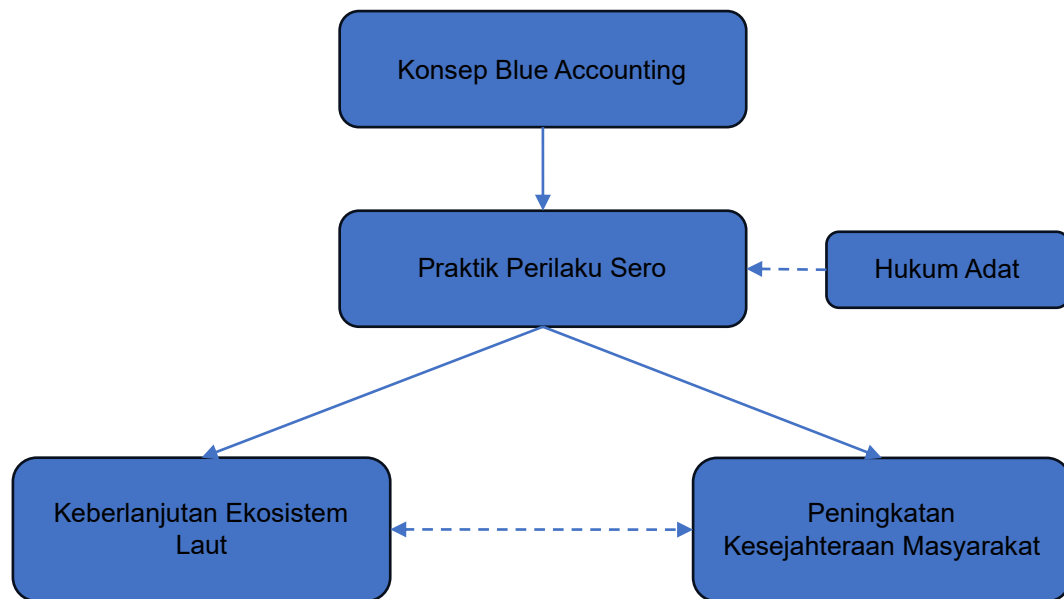
Melalui analisis kritis dengan pendekatan *blue accounting*, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam perilaku nelayan yang tidak berkelanjutan dan mendekonstruksi narasi yang ada. Hal ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai ekonomi sering kali mendominasi keputusan yang diambil oleh nelayan, meskipun ada kesadaran akan pentingnya keberlanjutan ekologi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan baru tentang perilaku nelayan, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang lebih efektif untuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka diskusi lebih lanjut mengenai integrasi antara ekonomi dan ekologi dalam konteks *blue accounting*, serta mendorong perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab di kalangan nelayan.

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila peneliti tersebut berkenan atau berkaitan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2009). Adapun kerangka pikir yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan dan arah penelitian adalah sebagai berikut:





Gambar 2. 1 Kerangka Alur Pemikiran

